

EDISI : Selsa, 22 October 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Selasa, 22 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Buleleng Siap Menjadi Tuan Rumah JUMBARA ke-V	Setelah sukses menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Bali beberapa tahun kemarin kini kabupaten buleleng yang akrab disapa dengan Kota Pendidikan itu bakalan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan jumpa bakti gembira tingkat provinsi bali. Pelaksanaan jumbara tingkat bali ke lima bakalan segera dilaksanakan di kabupaten buleleng. Hal tersebut tersirat setelah pengurus PMI Provinsi Bali yang dipimpin oleh wakil sekretaris PMI Bali.	
		Harapkan Perkembangan Objek Wisata	Danau buyan semakin menarik minat masyarakat untuk menyelesaikan keindahan alam. Hal itu memacu pemerintah kabupaten Buleleng untuk terus mengembangkan kawasan yang masih alami tersebut. Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra setelah menerima audiensi PMI Bali, senin (21/19) kemarin.	
2	NUSA BALI	Bahas Tiga Ranperda Tanpa Pansus	DPRD Buleleng, sepakat tidak membentuk panitia khusus membahas tiga ranperda yang diajukan eksekutif. Pembahasan akan diambil alih oleh masing-masing alat kelengkapan dewan. Tiga ranperda yang diajukan eksekutif masing-masing, ranperda perubahan perda nomor 13 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ranperda tentang perusahaan daerah air minum tirta hita denbukit kabupaten buleleng, dan ranperda tentang APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2019.	

		Foto Baru Presiden dan Wapres Belum Terpasang	Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sudah dilantik pada Minggu (20/10). Tapi pelantikan ini tak serta-merta dilakukan foto resmi kepala Negara dan wakilnya pada instansi, lembaga hingga sekolah. Dari pengamatan pada sekolah. Dari pengamatan pada Senin (21/10), foto lawas presiden Jokowi masih terpampang, bahkan wapres yang mendampingi masih Jusuf Kalla.	
--	--	---	--	--



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Bali post

Kategori :

pemkab

Mengacu Regulasi Terbaru Banggar Ditugaskan Bahas RAPBD 2020

Singaraja (Bali Post) -

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buleleng tahun 2020 mulai dibahas oleh anggota dewan yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Teknis pembahasan RAPBD tahun sebelumnya dengan cara membentuk panitia khusus (pansus). Namun, berbeda dengan pembahasan RAPBD 2020 ini. Sesuai regulasi terbaru, untuk membahas RAPBD itu, dewan tidak lagi membentuk pansus. Tetapi, sebaliknya RAPBD itu dibahas melalui AKD. Karena itu, pembahasan RAPBD itu disepakati dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Seperti Senin (21/10) kemarin, agenda tahapan pembahasan RAPBD itu memasuki pembacaan jawaban Bupati Buleleng terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Ketut Susila Umbara. Sedangkan, dari eksekutif dipimpin Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjitra, Sp. OG. didampingi Muspida Buleleng.

Setelah sidang ditutup, dewan mengadakan rapat internal dengan agenda pembentukan pansus. Rapat ini pun berlangsung singkat. Diputuskan, pembahasan lanjutan dokumen RAPBD itu ditugaskan kepada Banggar. Dengan keputusan ini, dewan tidak membentuk pansus seperti pembahasan RAPBD pada ta-

hun-tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Dewan, Susila Umbara, mengatakan perubahan mekanisme pembahasan RAPBD itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota. Pada regulasi itu diatur bahwa komisi-komisi itulah yang ditugaskan membahas rancangan peraturan daerah (ranperda). Selain itu, Peraturan DPRD Buleleng No. 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan juga mengatur, AKD itu ditugaskan untuk membahas ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

Dengan pertimbangan regulasi yang baru itu, maka diputuskan teknis pembahasan RAPBD dilakukan lewat Banggar DPRD. "Tadi sudah disepakati demikian. Kita tidak membentuk pansus lagi seperti sebelumnya. Meng-

apa tidak membentuk pansus, pasalnya dewan sepakat mekanisme teknis pembahasannya mengacu pada regulasi terbaru," jelas Susila Umbara. (kmb38)



Ketut Susila Umbara

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Pemkab

Kemen-PAN RB Setujui 358 Formasi CPNS untuk Buleleng



Gede Wisnawa

Singaraja (Bali Post) – Usulan Buleleng menambah Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mulai tahun anggaran 2019. Usulan itu ternyata mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Dari persetujuan itu, Buleleng diberikan jatah 358 orang CPNS dari pelamar umum. Untuk merebut peluang kursi CPNS itu dipastikan tidak akan diikuti pelamar dari Buleleng saja. Akan tetapi, peserta dari luar kabupaten diyakini ikut meramaikan seleksi menjadi abdi negara ini. Pasalnya, dalam perekrutan CPNS

tahun ini, ada empat kabupaten lain di Bali absen karena tidak mendapat formasi CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa usai sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng, Senin (21/10) kemarin mengatakan, persetujuan formasi CPNS itu dijemput langsung ke Kemen-PAN RB di Jakarta beberapa waktu lalu. Dokumen itu diterima dalam kondisi tersegel yang menunjukkan dokumen negara itu betul-betul kerahasiaannya dijaga ketat.

Setelah diizinkan memproses dokumen persetujuan CPNS itu, diketahui bahwa tambahan ASN baru itu terdiri dari formasi guru 198 orang, formasi tenaga kesehatan 99 orang, dan formasi tenaga teknis lainnya 61 orang. "Kita sudah ambil bersamaan rapat koordinasi ke Kemen-PAN RB dan itu masih tersegel. Setelah diizinkan membuka segel itu, baru kita ketahui kalau usulan menambah CPNS 358 orang itu ternyata disetujui," katanya.

Untuk sementara, pihaknya kata Wisnawa, baru menerima persetujuan formasi saja. Sedangkan pelaksanaan perekrutannya menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemen-PAN RB. Meski demikian, dengan disetujuinya formasi CPNS itu, maka tahapannya sudah akan dimulai tahun ini. Diawali seleksi *Computer Assisted Test* (CAT) yang akan digelar awal tahun 2020 mendatang.

"Kapan pendaftaran dan apa persyaratannya, kita masih menunggu instruksi kementerian. Yang jelas perekrutan ini dilakukan tahun ini. Tahapan pendaftarannya kemungkinan sampai Desember 2019 dan CAT-nya awal tahun depan," katanya.

Di sisi lain, Wisnawa menyebutkan, jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat itu dipastikan akan mengundang ribuan pelamar. Bahkan, persaingan merebut formasi ini tidak saja dari pelamar di Buleleng, namun dari kabupaten lainnya. Bahkan, bisa jadi dari luar Bali, dipastikan akan meramaikan seleksi

menjadi abdi negara tersebut. Hal ini karena empat kabupaten di Bali absen dalam perekrutan CPNS. "Prediksi kami, pesertanya akan membeludak, karena di kabupaten lain tidak ada perekrutan CPNS, sehingga ini tantangan buat pelamar dari daerah kita agar bisa lolos seleksi," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKPSDM mengusulkan tambahan ASN baru tahun 2019. Dari usulan itu, Buleleng perlu menambah ASN baru 374 orang. Rinciannya, untuk kategori CPNS sebanyak 168 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 206 orang. Jumlah itu sesuai analisis beban kerja (anjab - red) dan kajian terkait persentase ASN yang pensiun tahun 2018 lalu. Dari ASN yang telah pensiun itu diambil 30 persennya untuk usulan penambahan CPNS baru. Dibandingkan jumlah usulan itu, dengan persetujuan formasi ada 16 orang penambahan CPNS tahun 2019 tidak disetujui Kemen-PAN RB. (kmb38)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Pemkrab

Satpol PP Bongkar Reklame Tanpa Izin

Pemasangan reklame bodong alias tanpa izin tampaknya masih banyak ditemukan di beberapa lokasi di Buleleng. Ini terbukti dari hasil penertiban yang dilancarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng yang menurunkan reklame bodong, Senin (21/10) kemarin. Petugas pun tanpa banyak cincong lagi, kemudian menurunkan paksa reklame tersebut. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya dampak reklame bodong itu bagi pemerintah?

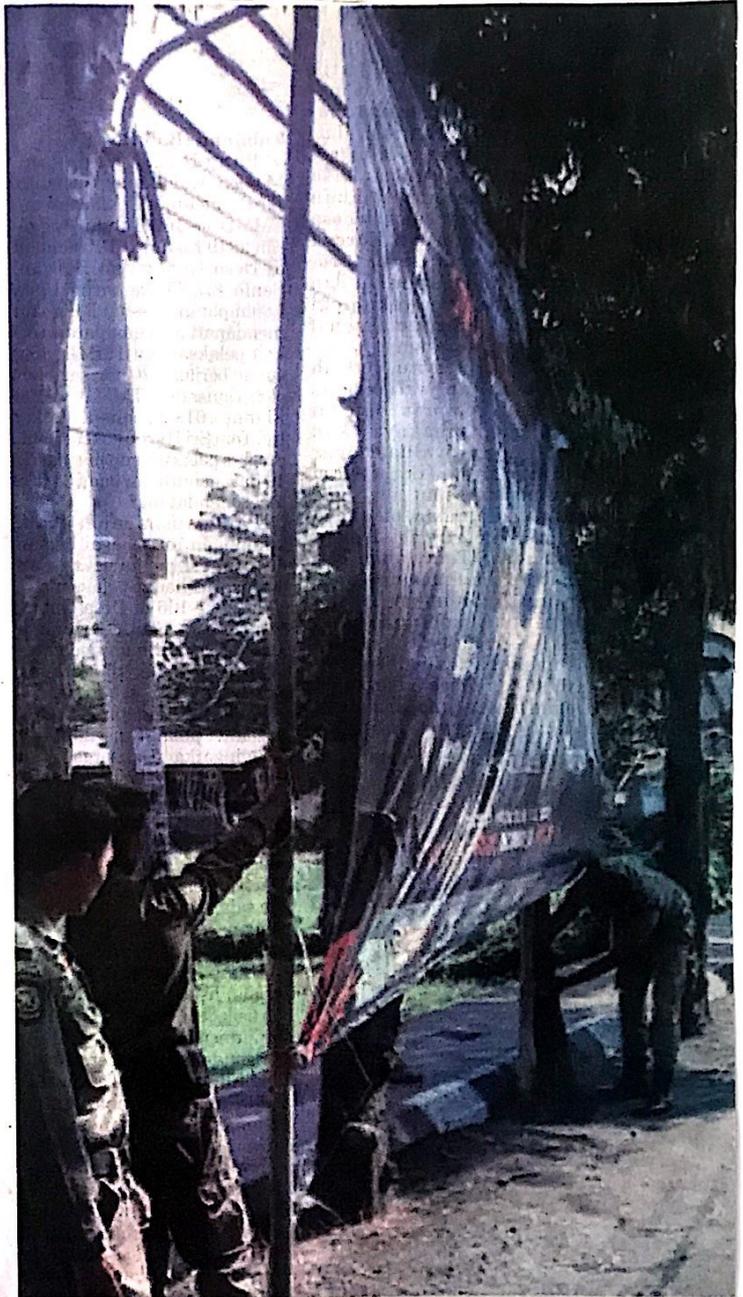
PENERTIBAN kemarin, menyorot lokasi pemasangan reklame di Jalan W.R. Supratman, Diponegoro, dan Jalan Gajah Mada, Singaraja. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan lima spanduk yang terpasang itu tidak dilengkapi izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPSP) Buleleng. Setelah dipastikan bodong, anggota Satpol PP itu kemudian membongkar spanduk tersebut. Selain itu, satu buah baliho jumbo juga terpaksa dibongkar. Ini karena reklame tersebut tidak dilengkapi izin yang berlaku. Tanpa harus mengkonfirmasi dengan pihak pemilik, petugas menurunkan paksa baliho itu.

Selain spanduk dan baliho bodong, penertiban juga menyorot aktivitas pedagang bermobil yang berjualan di badan jalan dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di atas trotoar. Petugas menemukan pedagang bermobil berjualan dengan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Atas pelanggaran itu, perlengkapan berdagang milik pedagang itu terpaksa disita. Barang bukti itu akan dikembalikan setelah pedagang itu mematuhi peraturan dengan tidak berjualan di pinggir jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas (lalin) di jalan raya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Buleleng Putu Dana mengatakan, penertiban itu merupakan program rutin Satpol PP sebagai institusi penegak peraturan daerah (perda). Sesuai kewenangan itu, pihaknya me-

nyasar reklame yang selama ini dicurigai bodong. Selain karena tidak membayar pajak, reklame bodong itu kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan bertambah marak, sehingga dapat mengganggu estetika Kota Singaraja. "Kami menindak karena tidak ada izin. Kalau dibiarkan bisa saja akan bertambah, sehingga pastinya dapat mengganggu estetika kota dan pemerintah akan dirugikan secara ekonomi, karena tidak membayar pajak sesuai regulasi yang ada," katanya saat didampingi Kepala Bidang (Kabid) Trantib Gusti Ketut Amerta Adi.

Di sisi lain, birokrat asal Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng ini mengatakan, penertiban akan terus berlanjut menyorot lokasi-lokasi pemasangan reklame di daerah lain. Upaya ini juga dilakukan oleh trantib di masing-masing kecamatan. Selain penertiban reklame bodong, pihaknya juga membidik reklame atau spanduk yang izinnya telah kedaluwarsa. Hal ini juga penting dilakukan karena kalau tidak dikontrol, maka pemerintah sendiri akan dirugikan. Pemerintah bisa memungut pajak selama masa waktu izin masih berlaku. Namun, kalau sudah kedaluwarsa, maka pemilik reklame itu bebas tanpa harus membayar pajak kepada pemerintah daerah. "Nanti, kami akan koordinasi lagi dengan DPMPPSP untuk turun bersama, sehingga kalau ditemukan izin pemasangan reklame kedaluwarsa, pemiliknya harus diingatkan untuk memperpanjang atau mencari izin baru sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya. (mud)



TERTIBKAN REKLAME - Satpol PP Pemkab Buleleng menertibkan izin di wilayah Kota Singaraja, Senin (21/10) kemarin.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Sosial

Akibat Angin Kencang

40 "Green House" Budi Daya Stroberi Roboh

Singaraja (Bali Post) -

Menyusul bencana angin kencang yang melanda Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Sabtu (19/10) lalu, Dinas Pertanian (Distan) Buleleng melakukan pendataan kerusakan usaha budi daya tanaman hortikultura di desa setempat Senin (21/10) kemarin. Dari 60 unit *green house* milik petani mandiri dan kelompok tani (poktan) di Desa Pancasari, tercatat 40 unit mengalami kerusakan akibat bencana alam. Sedangkan, tiga *green house* di antaranya bantuan pemerintah daerah juga rusak, tersisa satu unit masih utuh.

Kepala Dinas Pertanian (Distan), Made Sumiarta, mengatakan, dari seluruh *green house* yang rusak itu disebabkan oleh angin kencang, 30 unit tingkat kerusakannya ringan. Sedangkan 10 unit bangunannya roboh total. Oleh karena itu, peralatan di *green house* itu tidak dapat dioperasikan kembali.

Dari penelusuran di lapangan, sarana pertanian yang mengalami kerusakan itu kebanyakan milik petani mandiri. Bahkan, modal usaha petani itu tergolong menengah ke atas. Sarana pertanian milik petani dengan modal kecil, justru belum ditemukan ada yang mengalami kerusakan akibat bencana alam itu.

"*Green house* yang rusak berat atau sedang dan ringan itu usaha taninya sudah mengarah pada agribisnis. Modalnya sudah termasuk menengah ke atas. Untuk petani modal kecil belum ada kerusakan yang dis-

ebabkan angin kencang itu," katanya.

Selain sarana pertanian yang rusak akibat angin kencang itu, tanaman yang dibudidayakan di *green house* itu juga mengalami kerusakan. Dari penelusuran di lokasi kejadian, sebagian besar tanaman paprika, umur bervariasi antara dua bulan sampai satu tahun juga terdampak angin kencang itu. Tanaman itu dipastikan gagal panen karena tempat budi dayanya ambruk setelah diterjang angin kencang.

Lalu, bagaimana penanganan lanjutannya, Sumiarta menyebut dari kerusakan yang dialami petani, Distan akan melakukan kajian teknis. Kajian itu penting dilakukan untuk menentukan program yang memungkinkan diupayakan pihak Distan. "Kalau tanaman ada yang masuk gagal panen saat *green house*-nya roboh, otomatis tanaman yang ada di dalamnya juga

ikut terdampak. Namun, berapa besar kerugian tanaman itu masih sedang dihitung," jelasnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Ida Bagus Suadnyana, mengatakan, personel posko siaga bencana alam telah melakukan *assessment* guna menghitung kerusakan rumah warga, fasilitas umum (fasum), dan sarana pertanian *green house* itu. Beberapa rumah penduduk dari rangka, atap berupa genting maupun seng yang rusak setelah dihempaskan angin kencang. Namun, ada juga bangunan warga, dari rangka dan seluruh atapnya hancur setelah disapu angin kencang itu. "Rangka dan atap rusak itu diterbangkan angin yang sangat kencang. Palinggih juga ada yang rusak. Sementara datanya masih disempurnakan oleh teman-teman posko siaga bencana," jelas I.B. Suadnyana. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Sambungas



GREEN HOUSE ROBOH – Tercatat 40 unit green house untuk budi daya stroberi, paprika, dan tanaman hortikultura lainnya di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada roboh setelah diterjang angin kencang sejak Sabtu (19/10) yang lalu. Ball Post/kmb38